



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2025**



Disusun oleh :
Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu juga LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

TEMBILAHAN, JANUARI 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

EFRIZON, S.P.M., Ec.Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 19811028 200604 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2025 dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen penetapan kinerja, dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi Perjanjian Kinerja

Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Kab. Inhil tahun 2025 adalah sbb :

1.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim AKIP	73	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (N)}} \times 100$	9	13,80	153%
3.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}} \times 100$	22	28,14	128%

1.2. Target dan Realisasi Program tahun 2025

No	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persen Tase capaian	Realisasi Tahun sebelumnya (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	87,12 %	87,12 %	97,70 %
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah	4 %	61,87 %	2.062 %	108,48 %

1.3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 2021-2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja bapenda	Nilai AKIP	Nilai	72,15	75	73,3	73,05	N/A
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11,47	8,87	9,26	10,04	13,80
3	Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah	Rasio pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	19,43	24,96	24,89	22,74	28,14

2. Akuntabilitas Anggaran

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalokasikan Dana APBD sebesar Rp. 13.606.690.142,- dengan realisasi fisik sebesar 95,05 % dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 11.757.431.313,- atau 86,41 %, sedangkan sisa pagu dana sebesar 1.849.258.829,00,- atau 13,59 %.

Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2025 sbb :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.02	KEUANGAN	13.606.690.142	95,05	86,41	11.757.431.313
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.994.438.450	97,17	87,95	10.548.535.303
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.051.868	100,00	99,05	44.625.840
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.614.800	100,00	98,31	22.233.140
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14.350.000	100,00	98,18	14.088.140,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	2.550.000	100,00	99,80	2.545.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.714.800	100,00	97,99	5.600.000,00
5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.437.068	100,00	99,80	22.392.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.766.718	100,00	99,86	11.750.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	4.646.150	100,00	99,50	4.622.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.024.200	100,00	99,93	6.020.000,00
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.717.204.577	98,45	91,03	7.935.178.390
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.708.234.577	98,56	91,06	7.930.088.750
5.1.01.01.01.0001	Belanja gaji Pokok PNS	3.399.505.142	100,00	95,61	3.250.301.910,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja gaji Pokok PPPK	67.500.000	100,00	61,96	41.825.100,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	367.525.316	100,00	83,35	306.315.466,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.000.000	100,00	35,70	2.498.808,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan jabatan PNS	297.990.000	100,00	88,97	265.125.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.400.000	100,00	84,78	78.340.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.770.000	100,00	82,37	60.765.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.775.000	100,00	98,38	2.730.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	198.671.250	100,00	86,54	171.925.080,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.480.000	100,00	62,43	2.172.600,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.701.083	100,00	34,96	6.538.212,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	409.380	0,00	0,00	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.822	100,00	42,53	37.350,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.100	100,00	18,00	558,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	265.000.000	100,00	93,54	247.884.276,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.000.000	100,00	31,37	1.882.152,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	25.148.842	100,00	26,60	6.689.741,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.000.000	100,00	3,35	100.386,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran jaminan Kematian PNS	22.386.142	100,00	89,65	20.069.433,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran jaminan Kematian PPPK	3.000.000	100,00	10,04	301.143,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	915.000.000	100,00	94,37	863.490.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.594.950.000	100,00	94,51	1.507.443.912,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	11.250.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.054.300.000	100,00	95,72	1.009.177.824,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	750.000	100,00	10,25	76.885,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.100.000	100,00	66,76	26.103.871,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	67.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.000.000	100,00	13,67	3.553.759,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000	100,00	90,11	1.351.690,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/Pesenggrahan/Vila	600.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Pelayanan Kepelabuhan	9.375.000	100,00	72,19	6.767.441,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu - Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000	100,00	71,44	42.863.456,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu - Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	27.492.000	100,00	13,67	3.757.697,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Tempat Usaha Lainnya	371.500	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.700.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemanfaatan aset Daerah	19.993.000	0,00	0,00	-
5.02.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.970.000	56,81	56,74	5.089.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.874.000	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.096.000	100,00	99,88	5.089.640,00
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.072.000	100,00	67,79	13.607.400
5.02.01.2.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.072.000	100,00	67,79	13.607.400
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	12.000.000	100,00	50,00	6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	8.072.000	100,00	94,24	7.607.400
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.129.629	95,57	78,72	1.161.975.047
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.482.150	28,36	28,36	7.793.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.482.150	28,36	28,36	7.793.000
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	162.327.479	100,00	92,26	149.766.629
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	270.000	100,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.983.771	100,00	89,86	73.668.824
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	100,00	100,00	4.080.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.454.546	100,00	100,00	20.454.525

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.100.000	100,00	99,30	34.854.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.439.162	100,00	74,17	10.709.280
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	182.772.500	100,00	82,98	151.671.377
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.340.000	100,00	65,92	29.227.477
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.272.500	100,00	93,31	33.845.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.160.000	100,00	86,73	88.598.400
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	178.197.700	100,00	86,83	154.725.290
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	174.117.700	100,00	86,52	150.645.290
5.1.02.01.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	4.080.000	100,00	100,00	4.080.000
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	96,00	96,00	4.800.000
5.2.05.01.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000	96,00	96,00	4.800.000
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.349.800	95,06	75,32	693.218.751
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000	100,00	93,33	8.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	911.349.800	95,01	75,14	684.818.751
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.526.470.376	97,33	84,34	1.287.470.138
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	100,00	81,08	6.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.400.000	100,00	81,08	6.000.000
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	489.239.000	91,67	66,09	323.327.071
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.500.000	91,67	81,10	3.649.550
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	347.939.000	91,67	57,56	200.267.477
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	136.800.000	91,67	87,29	119.410.044
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.029.831.376	100,00	93,04	958.143.067
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.768.076	100,00	99,83	11.748.240
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.466.500	100,00	99,33	25.297.027
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	212.400.000	100,00	96,05	204.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000	100,00	93,75	67.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	345.600.000	100,00	92,10	318.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.600.000	100,00	99,53	63.300.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	162.000.000	100,00	100,00	162.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	100,00	100,00	18.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000	100,00	100,00	24.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	720.000	100,00	100,00	720.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.900.800	100,00	76,74	1.458.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.376.000	100,00	76,57	1.819.200
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	81.000.000	100,00	62,96	51.000.000
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.510.000	53,12	50,44	105.678.488
5.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.000.000	63,55	63,55	64.183.688
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50.000.000	76,98	76,98	38.488.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	61,35	61,35	9.815.688
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	45,37	45,37	15.880.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.110.000	100,00	88,08	41.494.800
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18.000.000	100,00	100,00	18.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	28.800	100,00	100,00	28.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	36.000	100,00	100,00	36.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.935.200	100,00	59,38	5.900.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000	100,00	93,84	8.220.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Computer	10.350.000	100,00	89,95	9.310.000
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.400.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.700.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	5.700.000	0,00	0,00	-
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	0,00	0,00	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.612.251.692	79,25	74,98	1.208.896.010
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.612.251.692	79,25	74,98	1.208.896.010
5.02.042.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	18.033.100	40,33	39,21	7.069.888
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.368.100	100,00	96,21	5.164.888
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.625.000	100,00	100,00	1.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	33,33	33,33	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000	0,00	0,00	-
5.02.04.2.01.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	67.210.500	68,36	68,00	45.705.148
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.422.000	100,00	92,91	3.179.484
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.988.500	66,67	66,67	5.325.664
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.800.000	66,67	66,67	37.200.000
5.02.04.2.01.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah	87.364.116	90,67	89,29	78.004.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.764.116	83,28	83,28	8.964.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	100,00	100,00	5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000	86,54	86,54	13.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000	87,34	87,34	20.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihanq	450.000	100,00	100,00	450.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.300.000	100,00	92,06	5.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.150.000	87,68	80,69	8.190.000
5.02.04.2.01.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan pajak Daerah	184.177.800	67,75	67,75	124.787.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.992.800	90,28	90,28	4.507.710
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.825.000	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	50,00	50,00	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000	100,00	100,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO	50.000.000	0,00	0,00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	130.544.700	75,18	73,73	96.254.808
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.788.450	100,00	97,23	7.572.642
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.356.250	100,00	99,99	2.356.125
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.400.000	73,09	71,70	86.326.041
5.02.04.2.01.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12.730.000	4,40	4,40	560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.690.000	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	66,67	66,67	560.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000	0,00	0,00	-
5.02.04.2.01.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	136.080.795	68,80	67,29	91.569.258
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.227.795	92,99	92,99	5.791.258
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.103.000	56,06	56,06	2.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000	33,33	33,33	5.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.750.000	61,10	61,10	26.730.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.200.000	81,60	78,45	51.148.000
5.02.04.2.01.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	397.746.000	99,16	87,34	347.404.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.996.000	100,00	98,04	17.643.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.468.500	100,00	100,00	14.468.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.120.000	100,00	91,94	26.772.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	283.611.500	100,00	85,12	241.419.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.200.000	100,00	100,00	8.200.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	100,00	100,00	7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.350.000	90,78	85,01	30.902.000
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	170.933.950	65,83	64,63	110.468.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.919.200	49,64	49,64	1.945.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.874.750	77,75	77,75	6.900.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	3.450.000	50,00	50,00	1.725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.650.000	80,90	80,90	20.750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	750.000	100,00	100,00	750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Kebersihan	450.000	100,00	100,00	450.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	85,71	85,71	6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.160.000	60,66	58,74	62.948.000
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	13.134.600	82,41	80,80	10.612.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.774.600	100,00	98,76	1.752.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	67,86	67,86	950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.960.000	81,33	79,42	7.910.000
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah	271.248.015	79,39	79,08	214.511.183
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.872.200	98,99	98,99	3.833.183
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.635.815	28,45	28,45	750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.160.000	69,69	69,69	7.080.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000	100,00	100,00	36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	41.250.000	5,87	5,87	2.420.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000	85,00	85,00	2.550.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	107.100.000	100,00	100,00	107.100.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	80,00	80,00	5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.480.000	84,06	82,68	49.178.000
5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	39.375.268	95,02	76,61	30.165.454
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.117.768	100,00	99,67	3.107.454
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.397.500	100,00	98,75	1.380.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.000.000	100,00	76,95	6.156.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.860.000	92,70	72,68	19.522.000
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.775.850	75,66	72,02	39.452.028
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.161.075	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.444.775	100,00	99,50	1.437.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.170.000	81,35	77,31	38.014.528
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.661.892	47,00	46,26	7.707.892
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.235.642	100,00	99,60	2.226.642
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.216.250	100,00	100,00	1.216.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	50,00	50,00	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.850.000	70,09	68,12	3.985.000
5.02.04.2.01.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12.235.106	68,33	37,79	4.623.371
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.106	100,00	98,95	3.463.371
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.375.000	65,45	43,64	600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	100,00	100,00	560.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	50,00	0,00	-
JUMLAH		13.606.690.142	95,05	86,41	11.757.431.313

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Susunan Organisasi	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Isu-Isu Strategis	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1 Skala Capaian Kinerja	18
3.2 Membandingkan Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	19
3.3 Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja 5 tahun terakhir	20
3.4 Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target Jangka menengah Renstra	21
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	21
3.6. Analisis atas efisiensi sumber daya	28
B. Akuntabilitas Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Permasalahan dan Strategi pemecahan masalah/Solusi	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai/ PTT/ Honorer Berdasarkan Pangkat dan Golongan	5
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan PNS	6
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah ..	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	14
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	14
Tabel 3.1	Skala Capaian Kinerja bapenda Tahun 2025	18
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kepala Bapenda tahun 2025	19
Tabel 3.3	Target Kinerja Renstra Bapenda Tahun 2025-2029	21
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Renstra Bapenda Tahun 2025	21
Tabel 3.5	Analisis efisiensi anggaran terhadap Kinerja Realisasi PAD.....	29
Tabel 3.6	Efisiensi anggaran kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD	30
Tabel 3.7	Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2025	30
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran Tahun 2021-202	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir	8
Gambar 2	Grafik perbandingan capaian kinerja Bapenda tahun 2021-2025.....	20
Gambar 3	Grafik Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran 2021-2025.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrumen akuntabilitas kinerja yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJIP bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta tingkat akuntabilitas pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut untuk menunjukkan kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kinerja Bapenda memiliki dampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, kemampuan pendanaan pembangunan, serta keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunan LKJIP Bapenda menjadi sarana penting untuk menilai sejauh mana target pendapatan, kualitas layanan perpajakan daerah, serta efisiensi tata kelola telah dicapai selama satu tahun anggaran.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan daerah, LKJIP juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Melalui proses ini, Bapenda dapat memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran berjalan selaras dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja, serta mendukung peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, penyusunan LKJIP menjadi komitmen Bapenda dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*) demi peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi PAD.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang di dirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fu'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, S.E. sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil yakni H. Usman Fa'ad, Yudha Yahya, B.A., Drs. Alibun Siregar, Drs. Jailani Sabrah, Drs. Nazaruddin Ahmad, Drs. Indra Bangsawan, Drs. Said Sarifuddin, Drs. Husni Hasan, H.

Edy Syafwannur, S.E., M.P., Drs. H.A.Rasyid. HZ, H. Fajar Husen, S.H., M.H., Junaidi, S.Sos., M.Si., Ir. H. Saripek, M.P., Drs. Aslimuddin, Hj. Nurlia, S.E., M.M., Drs. H. HELMI. D, M.Pd, Ir. H. T. Juhardi, M.P. (Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah tmt. Juni s.d. 28 Desember 2020), Fadillah, S.Pi., M.T. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Tmt. 28 Desember 2020 s.d. 27 Agustus 2025), MENA CHOIRIAH, S.Sos, MM (Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah mulai tanggal 27 Agustus 2025 s.d 24 Desember 2025), EFRIZON SE, M.Ec.Dev. Mulai tanggal 24 Desember 2025 sampai saat ini.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas pokok :

- (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.

(2) Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendataan dan pendaftaran PBB-P2, reklame dan air tanah, penilaian, verifikasi dan validasi data PBB-P2, reklame dan air tanah, dan Penetapan dan penyampaian PBB-P2, reklame dan air tanah.

(3) Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemungutan pajak hotel, restoran dan BPHTB, pemungutan Pajak hiburan, parkir dan sarang burung walet, dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan PPJ.

(4) Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengawasan, penertiban dan pemeriksaan pajak daerah, penagihan, penindakan dan penyitaan pajak daerah, dan keberatan pajak daerah.

(5) Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah.

Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas

yang terkait dengan hukum dan kerja sama, pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah, dan pembukuan pendapatan daerah.

1.2.2. Gambaran Personil

Sebagaimana kita maklumi personil merupakan persyaratan pokok yang perlu dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas di suatu unit kerja disamping faktor penunjang lainnya seperti pembiayaan dan perlengkapan.

Sebagai perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini didukung oleh personil PNS, disamping jumlah personil PNS sebagaimana tersebut, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Badan Pendapatan Daerah yang cukup luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga memperkerjakan/ memperbantuan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, adapun jumlah personil PNS 60 orang, PPPK 5 orang dan 47 orang Tenaga PTT/Honorer, untuk PNS sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	0	1	0	0
2	III/a	1	1	0	-	1
3	III/b	4	4	0	3	0
4	IV/a	21	20	1	10	10
5	IV/b	14	9	5	6	3
JUMLAH		41	34	7	19	15

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai/PTT/Honorer

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	-

	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	-	1
3	Pembina, IV/a	4	2	2
4	Penata Tk.I, III/d	20	10	10
5	Penata, III/c	10	5	5
6	Penata Muda Tk.I, III/b	5	3	2
7	Penata Muda, III/a	9	5	4
8	Pengatur Tk.I, II/d	6	6	-
9	Pengatur, II/c	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	-	-	-
11	Pengatur Muda, II/a	1	1	-
12	Juru Tk. I, I/d	-	-	-
13	Juru, I/c	1	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	PPPK	5	2	3
16	PTT/Honorer	47	15	32
JUMLAH		109	50	59

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 60 orang, 28 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, 6 orang fungsional ahli muda, dan jumlah staf non eselon 26 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan, diantaranya UPTD Kecamatan Kemuning belum ada PNS yang ditempatkan, UPTD Kec. Pulau Burung belum staf yang berstatus PNS, begitu juga UPTD Kec. Pelangiran, UPTD Kec. Mandah dan UPTD Kec. Tembilahan Hulu. Sedangkan PTT/Honorer berjumlah 47 orang tersebut diantaranya ditugaskan sebagai Tenaga Pengamanan Kantor sebanyak 11 Orang, 3 Orang sebagai Petugas Kebersihan Kantor, dan 1 Orang sebagai Tenaga Teknisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Listrik/Elektronik).

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan PNS

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	11
2	Sarjana	31
3	Sarjana Muda	5
4	SLTA	16

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
5	SLTP	2
6	SD	-
JUMLAH		62

Tabel 1.4

Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana	13
3	Sarjana Muda (D-III)	1
4	SLTA	33
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		47

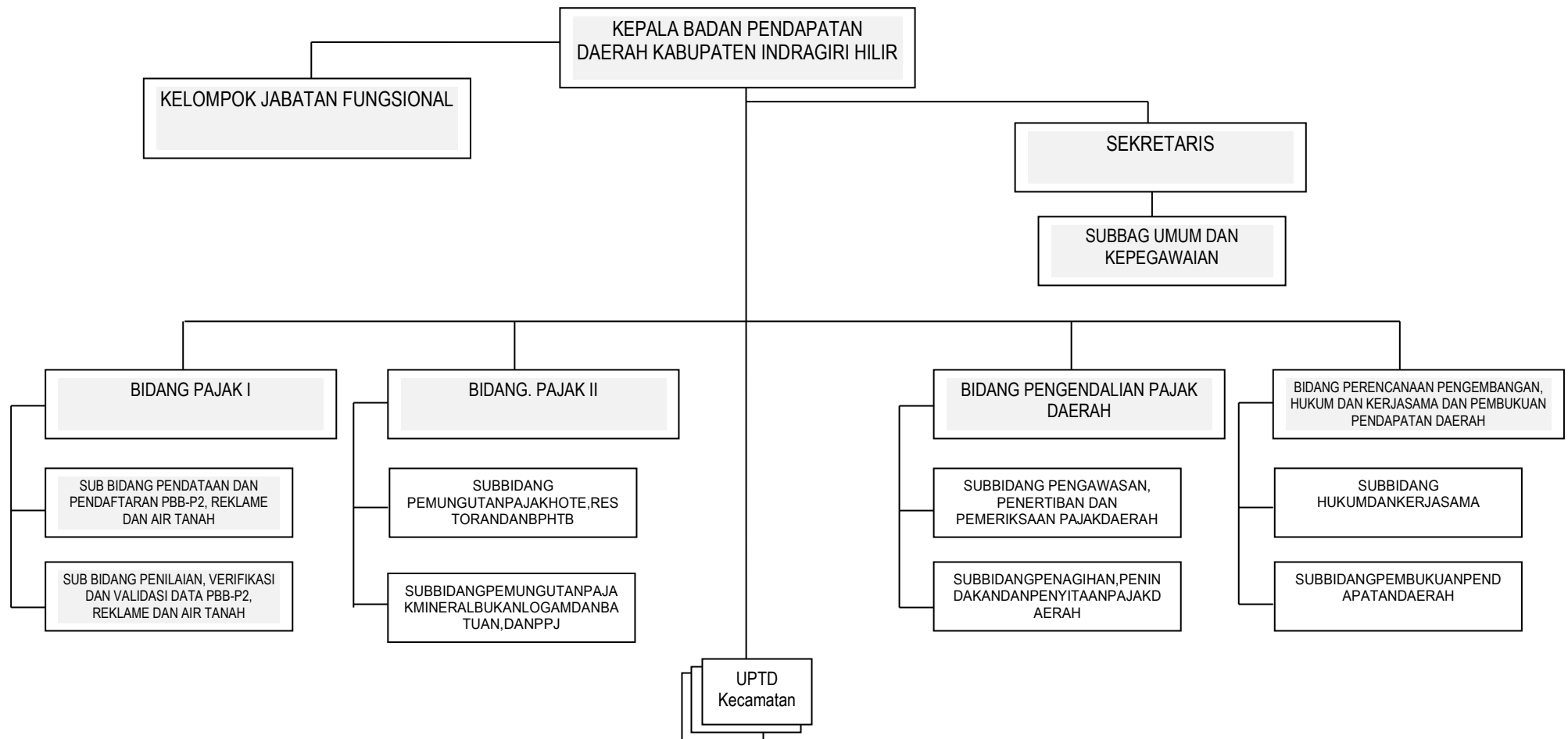
1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah; dan
 2. Subbidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah.
- c. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB; dan
 2. Subbidang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ.
- d. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan Pajak Daerah.
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Hukum dan Kerja Sama; dan
 2. Subbidang Pembukuan Pendapatan Daerah.
- f. Kelompok JF.
- g. UPTD Kecamatan

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 69 Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini berisikan sub bab pertama mengenai Capaian Kinerja setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Selanjut sub bab kedua Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Isu-isu Strategis

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) selain didukung tatanan pemerintah yang sistematis dan berorganisasi dengan sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, juga diperlukan tingkat disiplin dan budaya kerja dari aparatur pemerintah didalam melaksanakan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 adalah :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan jangka Menengah maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.**

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
(Renstra 2025-2029)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Catatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,46	13,60	13,70	13,80	13,89	13,99	
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	28,09	28,22	28,31	28,47	28,58	28,70	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	73 (BB)	74 (BB)	74,5 (BB)	75 (BB)	75,5 (BB)	76 (BB)	

2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Renstra Bapenda 2025-2029)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
2.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	%	22,9	28,09	28,22	28,31	28,47	28,58	28,7	
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	10,18	13,46	13,6	13,7	13,8	13,89	13,99	
4.	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	BB (73,00)	BB (73,05)	BB (74,00)	BB (74,50)	BB (75,00)	BB (75,50)	BB (76,00)	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan janji Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 masih mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73
2.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	22

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.913.767.124,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	2.201.045.968,-	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp.	15.114.813.092,-	APBD

Target PAD adalah sebesar Rp. 283.199.719.569,- sedangkan Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk terlaksananya 2 Program, dan 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 13.606.690.142,-

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 tertuang dalam Renja Perubahan dan DPPA Perubahan Tahun 2025 sesuai tabel berikut :

Tabel 2.4.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 (APBD Perubahan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Volume	Rencana (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN				13.606.690.142	100,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	90	11.994.438.450	88,49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Volume	Rencana (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	6
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	13	45.051.868	0,34
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	3	22.614.800	0,17
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	4	22.437.068	0,17
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	90	8.717.204.577	65,51
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	62	8.708.234.557	65,44
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	Laporan	18	8.970.000	0,07
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	20.072.000	0,15
5.02.01.2.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.072.000	0,15
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	90	1.476.129.629	10,94
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	27.482.150	0,21
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	162.327.479	1,22
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	2	182.772.500	1,22
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	3	178.197.700	1,34
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	6	5.000.000	0,04
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	309	920.349.800	6,92
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	90	1.526.470.376	11,47
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.400.000	0,06
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	489.239.000	3,68
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.029.831.376	7,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Volume	Rencana (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	6
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	90	209.510.000	1,57
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	43	101.000.000	0,76
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32	47.110.000	0,35
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	61.400.000	0,46
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	-	-	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah	Persen	3	1.612.251.692	12,12
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan pajak DaerahJenis Self Assesment	Persen	3	1.612.251.692	12,12
		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Official Assesment	Persen	3		
		Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100		
		Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak	Persen	100		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	1	18.033.100	0,14
5.02.04.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	1	67.210.500	0,66
5.02.04.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	1	87.364.116	0,66
5.02.04.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	1	184.177.800	1,38
5.02.04.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	12	130.544.700	0,98
5.02.04.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	1	12.730.000	0,10
5.02.04.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	12.000	177.330.795	1,33
5.02.04.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dokumen	163.000	356.496.000	2,68
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	3.200	170.933.950	1,28
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	13.134.600	0,10
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	37.100	271.248.015	2,04

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Volume	Rencana (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	6
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	1.600	39.375.268	0,30
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	285	54.775.850	0,41
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	16.661.892	0,13
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan	1	12.235.106	0,09

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Skala Capaian Kinerja

Skala Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Capaian dan Realisasi Kinerja Kepala Bapenda tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Capaian	Skala Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim AKIP	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (N)}} \times 100$	13.80	Kurang
3.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}} \times 100$	28,14	Kurang

- Capaian kinerja Nilai AKIP Bapenda tahun 2025 belum dapat disajikan, hal ini disebabkan evaluasi atas AKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai gambaran bahwa Nilai Evaluasi AKIP Bapenda tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 adalah 73.05 (BB) atau masuk pada katagori sangat baik.
- Capaian kinerja Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 13,80. Jika dilihat dari skala derajat kemandirian keuangan daerah maka nilai masuk skatagori kurang, meskipun tidak ada standar baku tentang kemandirian keuangan daerah, beberapa literatur dan kajian akademik

menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan antara total realisasi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah dengan skala derajat kemandirian sbb:

- 0,00 – 10,00 % = Sangat kurang
 - 10,01 – 20,00 % = Kurang
 - 20,01 – 30,00 % = Sedang
 - 30,01 – 40,00 % = Cukup
 - 40,01 – 50,01 % = Baik
- Capaian kinerja Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2025 adalah 28,14 %, Skala capaian ini masuk pada katagori rendah. Meskipun tidak ada satu nilai baku nasional terkait angka ini, namun dalam praktik perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, rasio idealnya berada pada kisaran berikut:
 - < 40 % = Rendah
 - 40 – 60 % = Sedang
 - 60 – 80 % = Baik/Ideal
 - > 80 % = Sangat baik

3.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi capaian pada tahun pelaporan

Capaian perbandingan antara target dan realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kepala Bapenda tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim AKIP	73	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (N)}} \times 100$	9	13.80	153%
3.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}} \times 100$	22	28,14	128%

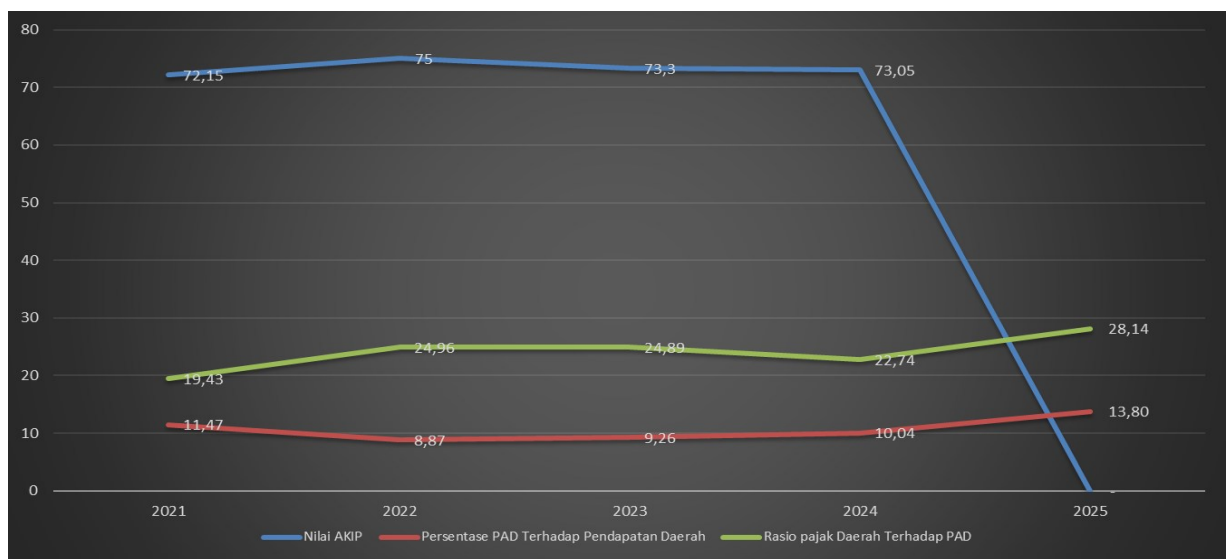
- Realisasi capaian Nilai AKIP Bapenda tahun 2025 belum dapat disajikan, hal ini disebabkan evaluasi atas AKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

- Realisasi capaian kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 13,80, realisasi ini melebihi dari target perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu 9 % tahun 2025. Jika dipresentasikan tingkat capaian adalah 153 %.
- Realisasi capaian kinerja Rasio pajak daerah terhadap PAD Bapenda tahun 2025 adalah 28,14 %, Realisasi ini melebihi dari target pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu 22 %, dengan tingkat presentase sebesar 128 %.

3.3 Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja lima tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Bapenda selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :

Gambar.2. Grafik perbandingan capaian kinerja Bapenda tahun 2021-2025



- Capaian Nilai AKIP Bapenda tahun 2021- 2025 berada pada range nilai 72-75, atau selama 4 tahun dengan bobot sangat Baik (BB), untuk tahun 2025 masih menunggu tim evaluasi melakukan penilaian.
- Realisasi capaian kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2025 berada pada range angka 19 – 28, dengan range ini selama 5 tahun terakhir tingkat kemandirian keuangan daerah masih masuk pada katagori kurang. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya agar kemandirian keuangan daerah terus membaik.
- Realisasi capaian kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD Bapenda tahun 2021-2025 berada pada range angka 11-13 %, range ini juga secara nasional masih masuk pada

katagori rendah, rasio Pajak daerah terhadap PAD yang ideal baik berada pada range antara 60 – 80 %.

3.4 Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Renstra Bapenda :

Untuk mengetahui perbandingan antara capaian kinerja terhadap target kinerja dalam rencana pada dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Catatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,46	13,60	13,70	13,80	13,89	13,99	
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	28,09	28,22	28,31	28,47	28,58	28,70	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	73 (BB)	74 (BB)	74,5 (BB)	75 (BB)	75,5 (BB)	76 (BB)	

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Renstra Bapenda Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim AKIP	73	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Realisasi PAD Tahun (N) ----- x 100 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (N)	13,46	13,8	103%
3.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	Realisasi Pajak Daerah Tahun (N) ----- x 100 Realisasi PAD Tahun (N)	28,09	28,14	100%

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

3.5.1. Analisis atas Capaian Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah,

1. Skala capaian pada indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah masuk pada katagori kurang,

2. demikian juga pada indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD masuk pada katagori rendah.

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan:

- Seberapa besar peran PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah);
- Seberapa rendah ketergantungan terhadap Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH);
- Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir masuk pada katagori rendah, dimana kemampuan daerah membiayai pembangunannya hanya 13,8 %, artinya tingkat ketergantungan akan keuangan dari pemerintah pusat sebesar 86,2 %. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya kemandirian keuangan daerah dan rendahnya rasio pajak daerah terhadap PAD antara lain adalah :

- **Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer**

Perekonomian Indragiri Hilir banyak bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan yang kontribusi langsungnya terhadap pajak daerah relatif terbatas. Sektor-sektor unggulan lainnya yang memiliki potensi besar pendapatan daerah seperti sektor pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan lainnyan masih belum banyak berkembang dan menopang perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

- **Kondisi geografis wilayah yang luas dan berkarakter kepulauan/perairan**

Aksesibilitas antarwilayah yang sulit dan biaya operasional pemungutan yang tinggi berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD.

- **Belum optimalnya peran BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir yang idealnya adalah sebagai mesin PAD**

Usaha yang dijalankan sebagian besar BUMD belum sepenuhnya belum selaras dengan potensi ekonomi lokal Indragiri Hilir, seperti kelapa, perikanan, dan logistik wilayah perairan, sehingga BMUD belum banyak berkontribusi dalam memberikan PAD bagi daerah.

- **Keterbatasan objek pajak daerah potensial**

Jumlah objek pajak seperti hotel, restoran, hiburan, parkir, dan reklame masih terbatas karena aktivitas jasa dan perdagangan belum berkembang signifikan.

- **Potensi pajak dan retribusi daerah belum tergali optimal**

Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara menyeluruh, termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta retribusi daerah.

- **Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah**

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah belum merata.

- **Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pajak daerah**

Digitalisasi layanan pajak daerah belum optimal dan menjangkau seluruh wilayah, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi sehingga pemungutan masih sangat bergantung pada metode konvensional.

- **Kapasitas dan jumlah SDM pengelola pendapatan daerah yang terbatas**

Keterbatasan aparatur yang baik jumlah maupun yang memiliki kompetensi teknis perpajakan daerah memengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.

- **Belum optimalnya pengawasan dan penegakan sanksi pajak daerah**

Pengendalian terhadap wajib pajak yang belum membayar nilai pajak dengan sebenarnya maupun penegakan aturan pajak daerah masih perlu diperkuat.

Upaya-upaya dan langkah-langka yang harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain adalah :

A. Optimalisasi Pajak Daerah (Intensifikasi)

1. Pemutakhiran dan integrasi basis data pajak daerah
Melakukan pendataan ulang objek dan subjek pajak (PBB-P2, restoran, reklame, parkir, MBLB, dll.) serta integrasi dengan data perizinan, kependudukan, dan OPD teknis.
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak
Melalui sosialisasi berkelanjutan, kemudahan layanan pembayaran, pemberian insentif kepatuhan, serta penegakan sanksi secara konsisten.
3. Penguatan pengawasan dan pengendalian penerimaan pajak
Mencegah kebocoran penerimaan dengan audit internal, monitoring transaksi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi)

4. Pengembangan objek pajak baru yang sah dan potensial
Mengoptimalkan pajak daerah sesuai regulasi, terutama pada sektor jasa, logistik, kawasan perdagangan, dan aktivitas ekonomi baru.
5. Penyelarasan kebijakan pajak dengan potensi ekonomi daerah
Menyesuaikan tarif dan kebijakan pajak secara selektif dan berkeadilan agar tetap menarik investasi namun meningkatkan kontribusi pajak.

C. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Pajak

6. Percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah
Meningkatkan Penerapan pembayaran non-tunai, *e-tax*, *tapping box*, dan layanan pajak berbasis daring untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan.
7. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah
Penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, dan peningkatan akses layanan di wilayah terpencil.

D. Penguatan Kelembagaan dan SDM

8. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah
Melalui pelatihan teknis perpajakan, pemanfaatan teknologi, serta manajemen kinerja berbasis hasil.

9. Penguatan peran Bapenda sebagai revenue center
Mendorong Bapenda tidak hanya sebagai pemungut, tetapi juga sebagai analis potensi dan perumus kebijakan pendapatan daerah.

E. Optimalisasi Sumber PAD Pendukung

10. Reformasi pengelolaan BUMD agar lebih produktif dan profesional
Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui perbaikan tata kelola, fokus usaha pada potensi unggulan daerah, dan kemitraan strategis.
11. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Mendorong kerja sama pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

F. Pengurangan Ketergantungan pada Dana Transfer

12. Penguatan perencanaan pendapatan daerah berbasis potensi riil
Menyusun target PAD yang realistis dan terukur sehingga mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
13. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lintas OPD
Memastikan seluruh OPD berkontribusi dalam penguatan PAD sesuai tugas dan kewenangannya.

3.5.2 Analisis terhadap Target dan Realisasi capaian pada tahun pelaporan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun pelaporan melebihi target yang ditetapkan.

- Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dari target 9 % dicapai 13,8 % dengan tingkat capaian 153 %.
- Indikator Rasio pajak daerah dari target 22 % dicapai 28,14 % dengan tingkat capaian sebesar 128 %.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi capaian melebihi target pada tahun pelaporan (tahun 2025) antara lain :

1. Adanya upaya dan kerja keras Bapenda terhadap Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
Realisasi PAD yang melampaui target dipengaruhi oleh meningkatnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya intensifikasi, seperti peningkatan pengawasan, penagihan aktif, dan perbaikan administrasi, mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta memperbesar penerimaan daerah.

2. Adanya kemudahan dan Perbaikan sistem dan kualitas pelayanan pendapatan
Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai/digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya realisasi PAD dibandingkan target yang ditetapkan.
3. Adanya upaya Pemerintah Daerah untuk Peningkatan aktivitas dan geliat ekonomi daerah
Membaiknya kondisi perekonomian daerah pada tahun berjalan berpengaruh terhadap peningkatan basis pajak daerah. Aktivitas usaha, perdagangan, dan jasa yang meningkat berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga mendorong tercapainya persentase PAD di atas target.
4. Penetapan target yang realistis dan terukur berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir
Target persentase PAD sebesar 9,0% ditetapkan secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi awal dan kapasitas fiskal daerah. Dengan adanya perbaikan kinerja dan faktor pendukung lainnya, realisasi mampu mencapai 13,8% atau melampaui target.

3.5.3 Analisis terhadap capaian kinerja beberapa tahun terakhir

- Capaian Nilai AKIP Bapenda tahun 2021- 2025 berada pada range nilai 72-75 atau selama 4 tahun dengan bobot sangat Baik (BB), untuk tahun 2025 masih menunggu tim evaluasi melakukan penilaian. Terjadi fluktuasi nilai AKIP bapenda naik dan turun dalam kurun waktu 4 tahun disebabkan beberapa faktor antara lain:
 - Perencanaan kinerja yang belum tersusun dengan baik
 - Pelaporan kinerja belum tersusun secara berjenjang
 - Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja, dll
- Capaian kinerja Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada range 9-13 %, keondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan masih berada pada level *kurang*. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Badan Pendapatan Daerah, namun belum memberikan hasil yang optimal. Ada banyak faktor yang menyebabkan antara lain :

- Masih banyak sumber-sumber PAD belum tergali secara optimal
- Perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor-sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, sementara masih banyak sektor lain yang belum terlalu berkembang seperti pariwisata, industri, logistik, jasa, sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah.
- BUMD sebagai mesin PAD belum berfungsi secara optimal
- Capaian kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada range 19-28 %, artinya kontribusi pajak daerah masih pada level kurang, kontribusi ideal berada pada angka > 60 %. Pajak daerah seharusnya berpotensi menjadi penyumbang PAD terbesar dalam struktur pendapatan daerah, namun banyak faktor yang menyebabkan hal ini sulit diwujudkan antara lain :
 - Data pajak daerah yang belum seluruhnya akurat
 - Tingkat partisipasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah
 - Terbatasnya SDM di bidang perpajakan baik kuantitas maupun kualitas
 - Penerapan sanksi yang belum optimal bagi wajib pajak yang melanggar
 - Kondisi alam yang Indragiri Hilir yang terpisahkan oleh laut dan sungai, dmenjadi faktor penghambat dalam penagihan pajak daerah
 - Masih Kurangnya sarana-dan prasarana bagi petugas pajak dalam melakukan penagihan pajak daerah

3.5.4 Analisis terhadap capaian kinerja terhadap target pada dokumen renstra

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Bapenda tahun 2025 melebihi dari target pada dokumen renstra. Dokumen renstra yang dijadikan perbandingan adalah Renstra Bapenda 2025-2029, jadi capaian kinerja yang dapat disajikan baru tahun 2025. Faktor-faktor yang menjadi penyebab antara lain adalah :

1. Adanya upaya dan kerja keras Bapenda terhadap Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

Realisasi PAD yang melampaui target dipengaruhi oleh meningkatnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya intensifikasi, seperti peningkatan pengawasan, penagihan aktif, dan perbaikan administrasi,

mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta memperbesar penerimaan daerah.

2. Adanya kemudahan dan Perbaikan sistem dan kualitas pelayanan pendapatan
Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai/digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya realisasi PAD dibandingkan target yang ditetapkan.
3. Adanya upaya Pemerintah Daerah untuk Peningkatan aktivitas dan geliat ekonomi daerah
Membaiknya kondisi perekonomian daerah pada tahun berjalan berpengaruh terhadap peningkatan basis pajak daerah. Aktivitas usaha, perdagangan, dan jasa yang meningkat berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga mendorong tercapainya persentase PAD di atas target.

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama penerimaan Pajak Daerah dan Peningkatan nilai SAKIP Bapenda. Sumber daya yang digunakan meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta waktu pelayanan.

3.6.1 Analisis Anggaran terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah

Efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Kemandirian Keuangan Daerah (PAD) adalah mengukur seberapa besar biaya (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan PAD, dengan rumus sbb :

Rumus Efisiensi Anggaran terhadap PAD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja Terkait PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \right) \times 100\%$$

Dengan interpretasi hasil :

< 5 %	: sangat efisien
5 – 10 %	: efisien
10 – 15 %	: cukup efisien
15 – 20 %	: kurang efisien

Dari penjelasan diatas dapat diketahui efisiensi anggran terhadap kinerja Kemandirian keuangan daerah seperti tabel berikut:

Tabel 3.5. Analisis efisiensi anggaran terhadap Kinerja Realisasi PAD

PAGU BAPENDA	REALISASI	PERSENTASE	TARGET PAD	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	DEFENISI OPERASIONAL	RASIO EFISIENSI REALISASI ANGGARAN TERHADAP REALISASI PAD	KETERANGAN
13.606.690.142	11.757.431.313	86,41%	311.422.585.205	270.310.839.527	86,80%	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja (PAD)}} \times 100$	4,35%	SANGAT EFISIEN

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target Kinerja Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 4,35 % atau sangat efisien.

3.6.2 Analisis efisiensi anggaran terhadap rasio pajak daerah

Efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD adalah mengukur seberapa besar biaya (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan pajak daerah, dengan rumus sbb :

Efisiensi anggaran Kinerja Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Realisasi anggaran terkait pajak daerah
	_____ x 100
	Realisasi Pajak Daerah

Dengan interpretasi hasil :

- < 5 % : sangat efisien
- 5 – 10 % : efisien
- 10 – 15 % : cukup efisien
- 15 – 20 % : kurang efisien

Dari penjelasan diatas dapat diketahui efisiensi anggran terhadap kinerja Rasio pajak daerah terhadap PAD seperti tabel berikut:

Tabel 3.6. Efisiensi anggaran kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD

ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	REALISASI	%	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI	%	RASIO EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PAD	KETERANGAN
1.277.674.206	1.208.896.010	94,62%	83.190.000.000	76.052.161.128	91,42%	1,59%	SANGAT EFISIEN

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target Kinerja Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1,59 % atau sangat efisien.

B. Akuntabilitas Anggaran

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah adalah Rp. 13.606.690.142. Adapun gambaran perbandingan antara ketersediaan dan realisasi Belanja Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.02	KEUANGAN	13.606.690.142	95,05	86,41	11.757.431.313
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.994.438.450	97,17	87,95	10.548.535.303
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.051.868	100,00	99,05	44.625.840
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.614.800	100,00	98,31	22.233.140

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14.350.000	100,00	98,18	14.088.140,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	2.550.000	100,00	99,80	2.545.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.714.800	100,00	97,99	5.600.000,00
5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.437.068	100,00	99,80	22.392.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.766.718	100,00	99,86	11.750.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	4.646.150	100,00	99,50	4.622.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.024.200	100,00	99,93	6.020.000,00
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.717.204.577	98,45	91,03	7.935.178.390
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.708.234.577	98,56	91,06	7.930.088.750
5.1.01.01.01.0001	Belanja gaji Pokok PNS	3.399.505.142	100,00	95,61	3.250.301.910,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja gaji Pokok PPPK	67.500.000	100,00	61,96	41.825.100,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	367.525.316	100,00	83,35	306.315.466,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.000.000	100,00	35,70	2.498.808,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan jabatan PNS	297.990.000	100,00	88,97	265.125.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.400.000	100,00	84,78	78.340.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.770.000	100,00	82,37	60.765.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.775.000	100,00	98,38	2.730.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	198.671.250	100,00	86,54	171.925.080,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.480.000	100,00	62,43	2.172.600,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.701.083	100,00	34,96	6.538.212,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	409.380	0,00	0,00	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.822	100,00	42,53	37.350,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.100	100,00	18,00	558,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	265.000.000	100,00	93,54	247.884.276,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.000.000	100,00	31,37	1.882.152,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	25.148.842	100,00	26,60	6.689.741,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.000.000	100,00	3,35	100.386,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran jaminan Kematian PNS	22.386.142	100,00	89,65	20.069.433,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran jaminan Kematian PPPK	3.000.000	100,00	10,04	301.143,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	915.000.000	100,00	94,37	863.490.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.594.950.000	100,00	94,51	1.507.443.912,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	11.250.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.054.300.000	100,00	95,72	1.009.177.824,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	750.000	100,00	10,25	76.885,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.100.000	100,00	66,76	26.103.871,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	67.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif Bagi ASN Atas PemungutanJasa Umum-Pelayanan Pasar	26.000.000	100,00	13,67	3.553.759,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000	100,00	90,11	1.351.690,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/Pesenggrahan/Vila	600.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Pelayanan Kepelabuhan	9.375.000	100,00	72,19	6.767.441,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu - Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000	100,00	71,44	42.863.456,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu - Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	27.492.000	100,00	13,67	3.757.697,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Tempat Usaha Lainnya	371.500	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.500.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.700.000	0,00	0,00	-
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemanfaatan aset Daerah	19.993.000	0,00	0,00	-
5.02.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.970.000	56,81	56,74	5.089.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.874.000	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.096.000	100,00	99,88	5.089.640,00
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.072.000	100,00	67,79	13.607.400
5.02.01.2.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.072.000	100,00	67,79	13.607.400

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	12.000.000	100,00	50,00	6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	8.072.000	100,00	94,24	7.607.400
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.129.629	95,57	78,72	1.161.975.047
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.482.150	28,36	28,36	7.793.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.482.150	28,36	28,36	7.793.000
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	162.327.479	100,00	92,26	149.766.629
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	270.000	100,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.983.771	100,00	89,86	73.668.824
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	100,00	100,00	4.080.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.454.546	100,00	100,00	20.454.525
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.100.000	100,00	99,30	34.854.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.439.162	100,00	74,17	10.709.280
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	182.772.500	100,00	82,98	151.671.377
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.340.000	100,00	65,92	29.227.477
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.272.500	100,00	93,31	33.845.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.160.000	100,00	86,73	88.598.400
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.197.700	100,00	86,83	154.725.290
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	174.117.700	100,00	86,52	150.645.290
5.1.02.01.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	4.080.000	100,00	100,00	4.080.000
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	96,00	96,00	4.800.000
5.2.05.01.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000	96,00	96,00	4.800.000
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.349.800	95,06	75,32	693.218.751
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000	100,00	93,33	8.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	911.349.800	95,01	75,14	684.818.751
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.526.470.376	97,33	84,34	1.287.470.138
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	100,00	81,08	6.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.400.000	100,00	81,08	6.000.000
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	489.239.000	91,67	66,09	323.327.071
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.500.000	91,67	81,10	3.649.550

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	347.939.000	91,67	57,56	200.267.477
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	136.800.000	91,67	87,29	119.410.044
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.029.831.376	100,00	93,04	958.143.067
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.768.076	100,00	99,83	11.748.240
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.466.500	100,00	99,33	25.297.027
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	212.400.000	100,00	96,05	204.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000	100,00	93,75	67.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	345.600.000	100,00	92,10	318.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.600.000	100,00	99,53	63.300.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	162.000.000	100,00	100,00	162.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	100,00	100,00	18.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000	100,00	100,00	24.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	720.000	100,00	100,00	720.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.900.800	100,00	76,74	1.458.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.376.000	100,00	76,57	1.819.200
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	81.000.000	100,00	62,96	51.000.000
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.510.000	53,12	50,44	105.678.488
5.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.000.000	63,55	63,55	64.183.688
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50.000.000	76,98	76,98	38.488.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	61,35	61,35	9.815.688
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	45,37	45,37	15.880.000
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.110.000	100,00	88,08	41.494.800
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18.000.000	100,00	100,00	18.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	28.800	100,00	100,00	28.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	36.000	100,00	100,00	36.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.935.200	100,00	59,38	5.900.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000	100,00	93,84	8.220.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Computer	10.350.000	100,00	89,95	9.310.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.400.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.700.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	5.700.000	0,00	0,00	-
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	0,00	0,00	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.612.251.692	79,25	74,98	1.208.896.010
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.612.251.692	79,25	74,98	1.208.896.010
5.02.042.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	18.033.100	40,33	39,21	7.069.888
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.368.100	100,00	96,21	5.164.888
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.625.000	100,00	100,00	1.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	33,33	33,33	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000	0,00	0,00	-
5.02.04.2.01.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	67.210.500	68,36	68,00	45.705.148
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.422.000	100,00	92,91	3.179.484
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.988.500	66,67	66,67	5.325.664
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.800.000	66,67	66,67	37.200.000
5.02.04.2.01.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah	87.364.116	90,67	89,29	78.004.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.764.116	83,28	83,28	8.964.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	100,00	100,00	5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000	86,54	86,54	13.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000	87,34	87,34	20.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihanq	450.000	100,00	100,00	450.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.300.000	100,00	92,06	5.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.150.000	87,68	80,69	8.190.000
5.02.04.2.01.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan pajak Daerah	184.177.800	67,75	67,75	124.787.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.992.800	90,28	90,28	4.507.710

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.825.000	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	50,00	50,00	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000	100,00	100,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO	50.000.000	0,00	0,00	-
5.02.04.2.01.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	130.544.700	75,18	73,73	96.254.808
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.788.450	100,00	97,23	7.572.642
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.356.250	100,00	99,99	2.356.125
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.400.000	73,09	71,70	86.326.041
5.02.04.2.01.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12.730.000	4,40	4,40	560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.690.000	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	66,67	66,67	560.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000	0,00	0,00	-
5.02.04.2.01.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	136.080.795	68,80	67,29	91.569.258
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.227.795	92,99	92,99	5.791.258
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.103.000	56,06	56,06	2.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000	33,33	33,33	5.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.750.000	61,10	61,10	26.730.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.200.000	81,60	78,45	51.148.000
5.02.04.2.01.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	397.746.000	99,16	87,34	347.404.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.996.000	100,00	98,04	17.643.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.468.500	100,00	100,00	14.468.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.120.000	100,00	91,94	26.772.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	283.611.500	100,00	85,12	241.419.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.200.000	100,00	100,00	8.200.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	100,00	100,00	7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.350.000	90,78	85,01	30.902.000
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	170.933.950	65,83	64,63	110.468.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.919.200	49,64	49,64	1.945.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.874.750	77,75	77,75	6.900.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pekan-Natura	3.450.000	50,00	50,00	1.725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.650.000	80,90	80,90	20.750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	750.000	100,00	100,00	750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Kebersihan	450.000	100,00	100,00	450.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	85,71	85,71	6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.160.000	60,66	58,74	62.948.000
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	13.134.600	82,41	80,80	10.612.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.774.600	100,00	98,76	1.752.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	67,86	67,86	950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.960.000	81,33	79,42	7.910.000
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah	271.248.015	79,39	79,08	214.511.183
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.872.200	98,99	98,99	3.833.183
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.635.815	28,45	28,45	750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.160.000	69,69	69,69	7.080.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000	100,00	100,00	36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	41.250.000	5,87	5,87	2.420.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000	85,00	85,00	2.550.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	107.100.000	100,00	100,00	107.100.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000	0,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.000.000	80,00	80,00	5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.480.000	84,06	82,68	49.178.000
5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	39.375.268	95,02	76,61	30.165.454
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.117.768	100,00	99,67	3.107.454
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	1.397.500	100,00	98,75	1.380.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	% FISIK	% KEUANGAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Cetak				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.000.000	100,00	76,95	6.156.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.860.000	92,70	72,68	19.522.000
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.775.850	75,66	72,02	39.452.028
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.161.075	0,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.444.775	100,00	99,50	1.437.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.170.000	81,35	77,31	38.014.528
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.661.892	47,00	46,26	7.707.892
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.235.642	100,00	99,60	2.226.642
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.216.250	100,00	100,00	1.216.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	50,00	50,00	280.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	0,00	0,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.850.000	70,09	68,12	3.985.000
5.02.04.2.01.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12.235.106	68,33	37,79	4.623.371
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.106	100,00	98,95	3.463.371
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.375.000	65,45	43,64	600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	100,00	100,00	560.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000	50,00	0,00	-
JUMLAH		13.606.690.142	95,05	86,41	11.757.431.313

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dapat terlaksana cukup baik, dengan rincian sbb :

- Jumlah Pagu Anggaran Bapenda RP. 13.606.690.142,-
- Realisasi fisk sebesar 95,05 %
- Penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.757.431.313,- (86,41 %)
- Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.849.258.829,-

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang penyerapan anggaran dibawah 50 % antara lain :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran 61.400.000, realisasinya 0 %. Penyebab tidak terealisasinya sub kegiatan ini adalah pihak ke tiga yang ditunjuk untuk melaksanakan reabilitas tidak dapat

melaksanakan pekerjaan akibat tidak adanya tenaga ahli yang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Sub kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.033.100, yang direalisasikan sebesar Rp. 7.069.888 atau 39,21 %, sisanya merupakan biaya honorarium tim yang tidak dapat dibayarkan tugas sudah menjadi tupoksi.
3. Sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dari anggaran sebesar 12.730.000, dapat tereslisasi hanya sebesar 560.000 atau 4 %. Sisanya merupakan anggaran honorarium tim Inventarisasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah tidak diambil. Honorarium tidak diambil karena tugas tersebut sudah menjadi tupoksi.
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dari anggaran yang tersedia sebesar 12.235.106, dapat direalisasikan sebesar 4,623,371, atau 37,79 %. Sisanya merupakan anggaran honorarium tim yang tidak dibayarkan karena tugas tersebut sudah menjadi tupoksi yang tidak diperbolehkan ada pembayaran honorarium.
5. Sisa lebih anggaran sebagian besar merupakan :
 - Sisa gaji yang tidak dibayarkan karena ada beberapa jabatan kosong yang tidak diisi, adanya ASN yang meninggal dunia dan ada yang dimutasi ketempat lain
 - Sisa uang hotel perjalanan dinas dimana sebagian besar ASN hanya menggunakan 30% dari anggaran hotel yang disediakan, dan adanya beberapa perjalanan dinas yang tidak terlaksana.

Tabel. 3.8

Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran 2021-2025

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% KEUANGAN	% FISIK
2021	15.416.229.408	11.285.839.880	4.130.389.528	73,21	91,08
2022	15.650.989.173	12.622.797.022	3.028.192.151	80,65	94,1
2023	17.569.941.421	14.151.354.517	3.418.586.904	80,54	93,27
2024	16.685.072.229	13.976.421.122	2.708.651.107	83,77	94,39
2025	13.606.690.142	11.757.431.313	1.849.258.829	86,41	95,05

...

Gambar 3. Grafik Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran 2021-2025



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Kabupaten Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2025. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai perwujudan penilaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pencapaian sasaran dan tujuan peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal, karena masih banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pada Tahun Anggaran 2025, PAD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 270.310.839.527,- dari target sebesar 311.422.585.205 atau sebesar 86,80 %. Sedangkan Realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (APBD) adalah Rp. 270.310.839.527,- terhadap Pendapatan Daerah (APBD) sebesar 1.958.716.930.762,- atau sebesar 13,80 %, realisasi ini melebihi target pada perjanjian kinerja Kepala Bapenda tahun 2025 sebesar 9 %.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalokasikan Dana APBD sebesar RP.13.606.690.142,- dengan realisasi fisik sebesar 95,05 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.757.431.313,- atau 86,41 %, sedangkan sisa pagu dana sebesar Rp. 1.849.258.829,- atau 13,59 %.

4.2 Permasalahan dan Solusi

4.1.1 Permasalahan

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Basis Pajak dan Retribusi Masih Terbatas

- Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer (perkebunan, perikanan) yang kontribusi pajaknya relatif kecil.
 - Minimnya industri pengolahan dan sektor jasa modern yang potensial sebagai objek pajak.
 - Nilai jual objek pajak (NJOP) di banyak wilayah masih rendah.
2. Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Belum Akurat
- Basis data pajak (PBB-P2, pajak usaha) belum ter-update secara berkala.
 - Banyak objek pajak belum terdaftar.
 - Peralihan hak atas tanah/bangunan sering tidak dilaporkan.
 - Integrasi data antar OPD (Bapenda, Disdukcapil, DPMPTSP, BPN, dll.) belum optimal.
3. Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah
- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha membayar pajak masih lemah.
 - Budaya “menunda bayar” cukup tinggi.
 - Sanksi administrasi belum memberi efek jera.
 - Kurangnya sosialisasi kebijakan pajak daerah secara masif dan berkelanjutan.
4. Keterbatasan SDM yang berkompetensi di Bidang Pajak Daerah, sehingga mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan pajak daerah dan Kelembagaan Bapenda
- Jumlah dan kompetensi petugas pemungut pajak masih terbatas.
 - Beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah pegawai.
 - Minimnya pelatihan teknis perpajakan daerah dan IT perpajakan.
6. Kendala Geografis dan Akses Wilayah
- Wilayah Indragiri Hilir luas dan banyak daerah pesisir/berair.
 - Biaya operasional pemungutan pajak tinggi.
 - Sulit menjangkau wajib pajak di wilayah terpencil.
 - Mobilitas petugas terbatas oleh infrastruktur transportasi.

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Capaian Realisasi fisik dan Keuangan pada program dan kegiatan masih kurang mencapai target realisasi yang diinginkan, hal ini disebabkan adanya faktor kesiapan atau kemampuan SDM dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun Time Schedul yang tepat sehingga menyebabkan tidak tuntasnya dalam melakukan kegiatan di lapangan.

4.1.2 Solusi

a. Pendapatan Asli Daerah

- Terus menerus melakukan perubahan data WP secara berkesinambungan, baik mutasi, pembetulan, pengurangan, penghapusan untuk terlaksananya tertib administrasi PBB sesuai harapan Wajib Pajak;
- Melakukan Rekonsiliasi Piutang PBB oleh Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dan mencari solusi terkait permasalahan tunggakan PBB dengan berkonsultasi ke Kementerian terkait, serta melakukan pendataan ulang dan melakukan validasi wajib pajak PBB;
- Rekrutmen tenaga teknis di bidang perpajakan dan Aparatur yang ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah harus benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi pendidikan yang dimiliki dan berkemampuan serta berintegritas tinggi;
- Melakukan Koordinasi, rekonsiliasi dan komunikasi secara intensif terus menerus kepada SKPD Pengelola PAD terkait permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah terkait;

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- PPTK dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan harus benar-benar terencana dan terjadwal dengan baik dengan melihat kondisi yang ada dan dapat menganalisa serta membaca perkembangan, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja tahun 2025, namun demikian kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, mohon masukan dan koreksi sebagaimana mestinya.

TEMBILAHAN, JANUARI 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

EFRIZON, S.IP.M., Ec.Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 19811028 200604 1 009